

# PERIMBANGAN KEKUATAN LAUT INDONESIA MASA KINI DIHADAPKAN DENGAN GEOPOLITIK KAWASAN ASIA PASIFIK

## CONSIDERATION OF THE PROPERTIES OF THE INDONESIAN NAVY AGAINST THE GEOPOLITICS OF THE ASIA PACIFIC REGION

Sartono<sup>1</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2</sup>, Buddy Suseto<sup>3</sup>

STRATEGI PERTAHANAN LAUT FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
UNIVERSITAS PERTAHANAN  
(p.sartono@gmail.com)

**Abstrak** – Pergeseran Geopolitik dari kawasan Eropa ke Asia Pasifik menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang memanas akhir-akhir ini. Meskipun terjadi perlombaan peningkatan kekuatan laut, namun belum dikatakan sebagai perlombaan senjata (*Arms Race*). Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan ini memiliki posisi strategis dalam menerima dampak positif dan negatif terkait dinamika geopolitik yang terjadi akhir-akhir ini. Kajian penelitian ini menitikberatkan pada perkembangan geopolitik kawasan Asia Pasifik dan upaya Indonesia dalam rangka meminimalisir kesenjangan perimbangan kekuatan laut di kawasan ini. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan. Studi ini menemukan bahwa ada dampak positif dan negatif atas perkembangan geopolitik kawasan Asia Pasifik dan implikasinya terhadap Indonesia, baik dari sisi pertahanan dan keamanan (militer), ekonomi dan politik. Hegemoni China dan Amerika Serikat di kawasan ini merupakan penyumbang besar atas potensi-potensi konflik yang terjadi dan perlombaan peningkatan kekuatan laut negara-negara kawasan. Oleh karena itu Indonesia perlu melakukan *bargaining* dalam memperkuat kekuatan lautnya dengan tetap memperhatikan secara seksama geopolitik kawasan Asia Pasifik, agar nantinya tidak direndahkan dan diabaikan kepentingan nasionalnya di kawasan.

**Kata Kunci:** Asia Pasifik, Geopolitik Kawasan, Keamanan Maritim, Kedaulatan dan Perlombaan Senjata.

**Abstract** – *The geopolitical shift from the European region to the Asia Pacific region has made this region a region that has been heating up recently. Even though there was a competition to increase marine power, it was not said to be an arms race. Indonesia as one of the countries in this region has a strategic position in receiving the positive and negative impacts related to the recent geopolitical dynamics. This research study is to determine the geopolitical development of the Asia Pacific region and Indonesia's efforts to minimize the gap in the balance of sea power in this region. The research was conducted using a qualitative research method with a literature study design. This study finds that there are positive and negative impacts on geopolitical developments in the Asia Pacific region and their implications for Indonesia, both in terms of defense and security (military), economy and politics. The hegemony of China and the United States in this region is a big contributor to the potential conflicts that occur and the race to increase the sea power of regional countries. Therefore, Indonesia needs to do bargaining in strengthening its maritime power while still paying close attention to the geopolitics of the Asia Pacific region, so that later its national interests in the region will not be undermined and neglected.*

**Keywords:** Arm Race, Asia Pacific, Maritime Security, Regional Geopolitics and Sovereignty.

---

<sup>1</sup>Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup>Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup>Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

## Pendahuluan

Saat ini dunia telah mengalami pergeseran Geopolitik dari kawasan Eropa ke Asia Pasifik (Aspas), utamanya di Laut China Selatan (LCS) dan Laut China Timur (LCT). Masing-masing negara telah mengambil inisiatif geopolitik dan geostrategis di Aspas, LCS dan LCT, yang menjadi sangat penting bagi kepentingan politik, ekonomi dan keamanan. Fenomena ini telah diprediksi oleh Dr. Sam Ratulangi,<sup>4</sup> pada tahun 1936 saat dipenjarakan oleh pemerintahan Kolonial Belanda di Sukamiskin Bandung. Melalui buku ditulis saat berada dalam tahanan tersebut menggambarkan yang lebih rinci betapa strategisnya kawasan Asia Pasifik di masa depan, sekaligus peran dan kedudukan Indonesia di tengah pertarungan antar berbagai kepentingan strategis negara-negara adidaya di kawasan ini.

Sam Ratulangi kemudian membagi kekuasaan di Asia Pasifik ke dalam empat perserangkaan, yaitu: barat, timur, utara, dan selatan yang masing-masing memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri di dunia. Dari arah selatan berdesakan tiga kepentingan masuk ke Pasifik, yaitu

kepentingan Inggris, Perancis, dan Belanda. Gerbang masuk secara geografis adalah Indonesia, secara non fisik adalah sistem kolonial. Perserangkaan Timur terbentuk oleh adanya kepentingan Amerika, sebuah kepentingan modal Amerika yang ditanam di Asia Timur.

Selanjutnya adalah perserangkaan bagian barat yang mencakup Jepang, China, Thailand, dan kelak Filipina. Di mana Jepang saat ini memegang peranan yang penting. Perserangkaan ini sekaligus sebagai obyek dan subyek, terlibat secara aktif dan pasif dalam masalah Pasifik. Terakhir adalah perserangkaan sebelah utara, yaitu Rusia yang menghendaki sebuah pelabuhan bebas es di Samudera Pasifik dan mendesak ke selatan. Saat ini, Pasifik telah menciptakan sebuah kawasan ekonomi-politik tersendiri, dengan masalahnya sendiri, yang basis dasarnya adalah kepentingan Amerika dan Jepang di satu pihak yang didukung oleh beberapa negara ASEAN dan Korea Selatan, dan China di pihak lain yang didukung oleh Rusia dan Korea Utara.

Sebagai salah satu negara di kawasan penting, Indonesia memiliki

---

<sup>4</sup>Hendrajit dan M. Arief Pranoto, "Takdir Geopolitik Indonesia Di Tengah Pertarungan Global AS-Cina Di Asia Pasifik", dalam <https://theglobal-review.com/takdir->

[geopolitik-indonesia-di-tengah-pertarungan-global-as-cina-di-asia-pasifik](https://theglobal-review.com/takdir-geopolitik-indonesia-di-tengah-pertarungan-global-as-cina-di-asia-pasifik), 2015, diakses 14 November 2020.

geopolitik yang strategis dalam interaksi global. Selain posisi silang di antara dua samudera dan dua benua yang merupakan peluang besar yang dapat diambil dalam panggung internasional, juga memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang luar biasa. Namun sepertinya, bangsa ini masih berjuang untuk dapat mengelola secara baik dan tepat letak kestrategisan posisi dan kekayaan SDA yang dimiliki.<sup>5</sup>

Memandang pentingnya geopolitik di kawasan Asia Pasifik ini dan sejalan dengan perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara dilingkungan internasional, maka Indonesia perlu merespons perkembangan ini secara lebih serius, baik dalam konteks politik luar negeri maupun pembangunan. Kapasitas demografi sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia membuat Indonesia rentan menjadi arena pertarungan geoekonomi dan geopolitik bagi negara-negara seperti China dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Indonesia perlu merespons melalui strategi pembangunan baik dalam bidang ekonomi maupun pertahanan yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan peta

kekuasaan ekonomi politik dunia yang dinamis.

Menilik potensi kekayaan laut yang melimpah dan letak geografis strategis menjadikan Indonesia sebagai pintu perdagangan dunia, semestinya Indonesia memperkuat geopolitiknya melalui pertahanan maritim. Hal yang sangat penting dalam geopolitik Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia agar melihat dirinya sebagai sebuah negara maritim (bangsa bahari). Bangsa Indonesia harus menjadikan laut sebagai prioritas yang ditopang oleh pertahanan udara dan darat. Meskipun saat ini adalah era milenial, jangan dilupakan bahwa konsep geopolitik dalam perspektif klasik, melihat negara itu memiliki ancaman dari negara lain dan jangan sesekali berpikir negara tidak punya musuh. Melihat geopolitik Indonesia adalah geopolitik yang bersifat anomali, karena tidak berdasarkan pada pakem yang ada. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah negara terbesar, namun dari sisi pertahanannya, Indonesia bukanlah yang terkuat. Jika berkaca pada pakem, semestinya Indonesia sebagai negara terbesar harus

---

<sup>5</sup>Hendrajit, "Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia Pasifik", *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, 2017.

memiliki pertahanan terkuat dan terbaik di kawasan ini.

Meskipun dalam beberapa dekade kedepan diprediksi tidak ada peperangan, namun siapa yang dapat menjamin bahwa perang suatu saat tidak terjadi. Siapa menyangka bahwa pada tanggal 27 September di sekitar daerah pegunungan Nagorno - Karabakh yang dipersengketakan Armenia dan Azerbaijan terjadi pertempuran antara kedua negara tersebut.<sup>6</sup> Maka dari itu memperkuat pertahanan dan keamanan nasional menjadi hal penting dalam mendukung pembangunan nasional. Jika pertahanan suatu negara kuat, maka negara-negara lain akan datang dengan persahabatan tanpa adanya tekanan.

Perimbangan kekuatan telah menjadi praktek politik internasional selama lebih dari tiga abad. Ketika suatu negara atau blok negara menjadi terlalu kuat, maka negara lain menyikapinya sebagai suatu ancaman bagi keamanan negaranya dan merespons dengan upaya perimbangan kekuatan. Baik sendiri maupun dengan bantuan negara lain

(aliansi militer), untuk meningkatkan kekuatannya. Menurut Ian Montratama dan Yanyan Mochamad Yani,<sup>7</sup> hanya ada dua opsi yang ditawarkan dalam Teori Perimbangan Kekuatan (TPK), yaitu: *Balancing* dan *Bandwagoning*. *Balancing* adalah suatu upaya mengimbangi kekuatan (negara atau aliansi) pesaing dengan membangun kekuatan internal atau aliansi (sebagai kekuatan eksternal). Sedangkan *bandwagoning* merupakan upaya kompromi dengan kekuatan pesaing untuk menghindari konflik, baik dalam bentuk memenuhi kepentingan pesaing atau menjadi bagian dalam aliansi pesaing. Indonesia, dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, memiliki keterbatasan untuk beraliansi dengan kekuatan eksternal dunia. Politik bebas aktif cenderung dibakukan oleh elite politik Indonesia yang tidak dapat diubah. Sementara untuk membangun kekuatan internalnya secara mandiri, Indonesia membutuhkan banyak sumber daya dan masih menghadapi banyak kendala, baik dari teknologi maupun sumber daya lainnya.

---

<sup>6</sup>BBC Indonesia, "Konflik Armenia-Azerbaijan: Kedua Kubu Sepakati Gencatan Senjata Yang Diperantarai AS", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54655091>, 23 Oktober 2020, diakses tanggal 14 November 2020.

<sup>7</sup>Ian Montratama dan Yanyan Mochamad Yani, "Bargaining: Revisi Teori Perimbangan Kekuatan Dalam Hubungan Diplomas Indonesia, Malaysia, Cina dan Amerika Serikat", *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 2. No. 1, 2017.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan. Sugiyono menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini biasa digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dengan analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>8</sup>

Sedangkan desain studi kepustakaan melakukan pendalaman data-data berdasarkan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Penelitian kualitatif ini menekankan bahwa suatu kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan sebuah pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif ditujukan dalam rangka

memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan atau obyek yang diteliti. Metode ini dipilih karena metode ini menekankan kepada fenomena-fenomena dalam kehidupan sosial.

## Hasil dan Pembahasan

### Politik Keamanan Maritim Indonesia

Kondisi lingkungan strategis kawasan saat ini penuh dengan ancaman dan tantangan keamanan yang bersumber dari aktor negara maupun non negara. Bentuk ancaman dan tantangannya pun semakin beragam, yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu simetris dan asimetris. Ancaman dan tantangan simetris ini secara umum dapat berasal dari aktor negara (*state actor*), sedangkan asimetris bisa muncul dari aktor non negara (*non state actor*) dan boleh jadi mendapat dukungan *state actor*, meskipun secara diam-diam. Namun demikian perlu menjadi catatan bahwa ancaman asimetris tidak dapat dibatasi pada bentuk organisasi aktornya, tetapi juga

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. Ke-19 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).

<sup>9</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. oleh Ayup, Cet. 1 (Sleman, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

bagaimana kekuatan, kesenjataan dan moral yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Ancaman simetris ini muncul dari berbagai macam kasus, seperti sengketa perbatasan antar negara yang belum terselesaikan dengan baik, perlombaan senjata Angkatan Laut (*naval arms race*) dan masalah kebebasan penggunaan laut (*freedom of navigation*). Saat ini yang dapat dilihat dengan mudah adalah persaingan antara Amerika Serikat beserta sekutunya melawan China disisi lain menyangkut pembangunan kekuatan militer China dalam rangka menguasai Laut China Selatan, dan pada bagian lain adalah pembangunan kekuatan laut India dalam rangka mengendalikan Samudera Hindia sesuai dengan aspirasi politiknya.

Sedangkan ancaman asimetris pada bidang maritim dapat berupa ancaman perompakan, pembajakan, terorisme maritim, proliferasi senjata pemusnah massal dan pencurian sumber daya laut.<sup>11</sup> Ancaman keamanan maritim yang dihadapi Indonesia pada akhirnya akan menjadi permasalahan bersama di kawasan Asia Tenggara atau sebaliknya, yang dapat berkembang menjadi masalah

bagi pertahanan dan keamanan, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Kemudian dari sini, muncullah berbagai forum terkait keamanan maritim seperti *Regional Maritime Security Initiative* (RMSI), *Proliferation Security Initiative* (PSI), *International Ship and Port Facility Code* (ISPS Code), *Global Maritime Partnership/Thousand-Ship Navy* dan lain sebagainya. Ancaman asimetris pada bidang maritim kini telah menjadi perhatian semua negara di kawasan, karena dipandang dapat mengancam stabilitas kawasan.

Ada enam isu penting keamanan maritim yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan regional Asia Tenggara dalam pembangunan maritim antara lain; (i) konflik perbatasan karena klaim teritorial, *overlapping claim to jurisdiction*, (ii) *sea piracy and armed robbery*, (iii) *maritime terrorist threat*, (iv) *trans-national organized crime*, (v) *safety of navigation* dan (vi) *marine environment protection*.

Kemudian dari perspektif Indonesia, peta permasalahan maritim domestik, antara lain meliputi: (i) ada

---

<sup>10</sup>Susilo Bambang Yudhoyono, "Geopolitik - Geopolitik Kawasan Asia Tenggara: Perspektif Maritim", dalam [https://theglobal-review.com/lama/content\\_detail.php?lang=id](https://theglobal-review.com/lama/content_detail.php?lang=id)

&id=17778&type=111, 2015, diakses tanggal 14 November 2020.

<sup>11</sup>Ade Supandi, "Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 2, 2015.

masalah perbatasan di laut yang sangat serius; (ii) bahaya terhadap keamanan pelayaran dan keselamatan navigasi di sepanjang *life lines* domestic; (iii) ada potensi ancaman terorisme maritim di *choke point*; (iv) ada berbagai kegiatan *illegal fishing, illegal logging, illicit small arms trafficking, illicit people trafficking, illicit drugs trafficking (narcotics), people smuggling*; dan (v) dampak perubahan iklim.<sup>12</sup>

Empat dari tujuh *choke point* internasional saat ini ada di perairan Indonesia, sehingga sangat rawan terhadap serangan terorisme maritim. Setiap hari ratusan kapal berbagai jenis dan dari berbagai negara melintasi perairan ini, kondisi yang demikian sangat memungkinkan terjadinya serangan. Apabila terjadi serangan terorisme maritim dan Indonesia gagal mengatasi, sudah tidak diragukan lagi negara-negara yang memiliki kepentingan dengan perairan Indonesia, dapat dipastikan akan turun tangan langsung. Kemudian dampak yang ditimbulkan akan terkoneksi pada semua bidang, baik politik, ekonomi, hukum maupun militer.

## **Konflik Maritim**

Konflik maritim terkait dengan perbatasan laut dan klaim kepemilikan pulau antar negara menjadi sebuah keniscayaan dalam arena geopolitik kawasan. Konteks kelautan dan kemaritiman tidak dapat dipisahkan dari perspektif politik, ekonomi, dan pertahanan bagi negara pantai dan negara kepulauan. Laut dan gugus pulau makin menemukan makna pentingnya ketika geopolitik kontemporer semakin dipenuhi oleh ketegangan-ketegangan maritim akibat imbas dari sengketa perebutan pulau antar negara. Terkait dengan geopolitik kawasan Asia Pasifik, pulau kecil telah mengubah geopolitik dan geostrategis global dalam persaingan ekonomi, politik dan militer antar negara.

Yoichi Funabashi, Direktur *Asia Pacific Initiative (AP Initiative)*, menyebutkan bahwa pergeseran kekuatan ke Asia Pasifik, akan menjadi transisi yang panjang, dan Asia menghadapi tiga tantangan besar selama dekade berikutnya, yaitu: (i) ketidakstabilan rezim Korea Utara dan upaya penyatuan Semenanjung Korea; (ii) keamanan maritim di Laut China

---

<sup>12</sup>Bappenas, "Konsep 'Mainstreaming Ocean Policy' kedalam Rencana Pembangunan Nasional", 2014.

Selatan, Laut Kuning dan Laut China Timur; dan (iii) energi dan lingkungan. Sehingga di masa mendatang konflik di kawasan Asia Pasifik akan didominasi oleh klaim maritim seperti penentuan ZEE, Batas Landas Kontinen, perebutan pulau-pulau kecil strategis, dan eksplorasi laut dalam.

Kemudian di tingkat regional, lingkungan strategis Indonesia akan ditandai di lima perkembangan dan kecenderungan regional Asia Pasifik, yaitu: (i) kepentingan dan kebijakan keamanan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, India, dan Australia; (ii) dinamika perkembangan dan kecenderungan kerja sama keamanan multilateral khususnya ASEAN dan ARF; (iii) dinamika kerja sama dan kompetisi ekonomi regional terkait dengan prospek perdagangan bebas dan kompetisi mengenai akses terhadap pasar dan *resources* (sumda alam, sumda manusia, modal dan teknologi); (iv) potensi konflik antar negara terkait sengketa wilayah dan perbatasan (laut dan darat); dan (v) meningkatnya arti penting isu dan masalah kejahatan lintas negara.

Isu-isu geopolitik dan geostrategis di masa mendatang akan didominasi oleh konflik pengaruh dalam sebuah kawasan. Barry Buzan menyebutnya sebagai fenomena *security complex*.<sup>13</sup> Dalam hubungan ini, Malaysia secara cerdas memanfaatkan aliansi strategisnya dalam *Five Power Defence Arrangement* (FPDA) yang beranggotakan Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris dalam klaim kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berhasil dimenangkan melalui keputusan Mahkamah Internasional. Termasuk keberhasilannya membendung pengaruh China dalam sengketa Kepulauan Spratly yang diperebutkan oleh enam negara yang dekat dengan akses Laut China Selatan.

Dalam geopolitik pertahanan istilah zona penyangga (*buffer zone*) lazim dikenal. Istilah ini merujuk pada wilayah yang secara geografis bukan wilayah kedaulatan namun secara strategis merupakan wilayah pengaruh dari suatu negara. Doktrin pertahanan maritim melibatkan proyeksi kekuatan laut negara pantai dan kepulauan. Beberapa tahun yang lalu, bahwa klaim pengaruh Australia pada wilayah maritim melalui rencana penerapan zona keamanan laut

---

<sup>13</sup>Barry Buzan dan Lene Hansen, *The Evolution Of International Security Studies*, Ed. 1

(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009).

(*Australian Maritime Identification Zone/AMIZ*) yang memiliki daya jangkau seluas 1.000 mil laut (1.600 km) dari garis pantainya.<sup>14</sup> Zona tersebut telah memasuki wilayah teritorial Indonesia dan beberapa negara tetangga Australia lainnya dan berpotensi melanggar kedaulatan negara-negara tetangga. Dalam konsep AMIZ tersebut,<sup>15</sup> Australia berhak memeriksa kapal-kapal yang memasuki radius 1.000 mil laut, baik jenis muatan maupun rincian perjalanan kapal, konsep ini mendapat penolakan dari semua negara tetangga, bahkan Indonesia mengancam akan menggelar kekuatan jika Australia memaksakan diri memasuki perairan Indonesia.<sup>16</sup>

Kemudian, China dengan konsep *blue navy strategy* melakukan proyeksi agar PLA Navy mampu mengamankan *String of Pearls* atau *First and Second Island Chain*, sebuah perimeter maritim untuk menjamin keamanan pasokan energi dan perdagangan yang 80 persennya melalui jalur Selat Malaka dan LCS. Sementara itu, India telah membuat

terobosan yang lebih maju dalam menerjemahkan geopolitik maritim melalui konsep *Maritime Military Strategy* yang diupdate dengan cetak biru *the "Indian Naval Indigenisation Plan (INIP) 2015-2030"*.<sup>17</sup> Dokumen ini ditujukan untuk mendorong pengembangan peralatan dan sistem asli buatan India selama 15 tahun ke depan. Ini mencoba untuk merumuskan persyaratan Angkatan Laut India dan mencantumkan peralatan yang dapat digunakan untuk penggunaan dalam negeri India di tahun-tahun mendatang. Sebuah fase baru kemandirian dengan memproduksi peralatan berteknologi tinggi dan maju di India, sesuai dengan visi Pemerintah India tentang '*Make in India*'. Proyeksi Angkatan Laut India selanjutnya akan menjadi ancaman potensial bagi Indonesia di Samudera Hindia, Laut Andaman, Selat Malaka dan Pulau Rondo di Aceh.

Setidaknya eksistensi pulau-pulau kecil memegang peran kunci dan strategis dalam doktrin pertahanan

---

<sup>14</sup>Natalie Klein, "Legal implications of Australia's Maritime Identification System," *International and Comparative Law Quarterly*, 2006.

<sup>15</sup>Athiqah Nur Alami, "Kebijakan Pertahanan Australia Dan Respons Negara-Negara Asia Timur Dan Selandia Baru," *Jurnal Penelitian Politik*, 2016.

<sup>16</sup>Detik.com, "RI Akan Gelar Kekuatan Laut Jika Australia Terapkan AMIZ", dalam

<https://news.detik.com/berita/d-257770/ri-akan-gelar-kekuatan-laut-jika-australia-terapkan-amiz>, 17 Desember 2004, diakses tanggal 23 November 2020.

<sup>17</sup>Indian Navy, "Indian Naval Indigenisation Plan (INIP) 2015-2030," *Directorate of Indigenisation*, 2015.

negara kepulauan sebagai zona penyangga bagi perlindungan pulau-pulau utama. Mengingat arti penting geopolitik pulau-pulau kecil, maka dimasa mendatang, perairan laut dan pulau-pulau kecil akan menentukan isu-isu penting global seperti pemanasan global, *marine ecological conservation*, *ocean biodiversity*, eksplorasi dan eksploitasi blok migas, perikanan, pengembangan energi alternatif seperti angin, gelombang, pasang surut, arus laut (*onshore*, *nearshore* dan *offshore*), bisnis pariwisata bahari, *marine protected area*, *marine biotechnology*, area pengamanan navigasi pelayaran, barang muatan kapal tenggelam (BMKT), *marine and coastal giant property*, serta resolusi klaim perbatasan maritim.

### **Kepentingan Strategis Indonesia**

Dalam dinamika perkembangan dan kompleksitas geopolitik kawasan Asia Pasifik seperti digambarkan di atas, secara garis besar kepentingan dan tujuan politik luar negeri Indonesia ke depan adalah menitikberatkan pada upaya mengedepankan identitas negara kepulauan dalam berdiplomasi dan membangun kerja sama internasional. Indonesia juga perlu menguatkan diplomasi *middle power* yang dapat

menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Asia Pasifik, dan meningkatkan pelibatan peran, aspirasi serta kepentingan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri, serta menata infrastruktur diplomasi.

Diplomasi *middle power* ini dipahami sebagai diplomasi Indonesia dalam kapasitas negara yang memiliki sumber daya yang cukup berpengaruh dan diakui oleh dunia internasional, memiliki posisi geografis dan ideologis yang signifikan, serta menunjukkan perilaku internasional yang bertanggung jawab, pro multilateralisme dan mengadopsi prinsip *good international citizenship*. Secara normatif, politik luar negeri Indonesia tetap menganut prinsip politik bebas aktif dan memelihara hubungan baik dengan AS, Rusia dan China serta negara-negara kuat lainnya. Hal ini dilakukan dengan mendorong partisipasi yang lebih aktif dari negara-negara besar dan negara-negara kawasan dalam proses penyelesaian sengketa regional secara damai dan menjaga stabilitas kawasan.

### **Stabilitas Keamanan Nasional**

Kondisi keamanan suatu bangsa tidak terlepas dari keterkaitan antara geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, keamanan nasional merupakan suatu sistem dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi, serta saling menentukan, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan diperhitungkan dalam menentukan arah pencapaian tujuan nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa NKRI berdiri dengan tujuan nasional meliputi:

”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pernyataan alinea keempat tersebut mengandung arti bahwa: (i) diperlukan suatu situasi dan kondisi yang dapat menjamin terselenggaranya seluruh proses dalam mewujudkan

tujuan, cita-cita, dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional yang terencana dan terprogram; (ii) membebaskan seluruh rakyat Indonesia dari kemiskinan dan kebodohan yang diwujudkan dengan adanya stabilitas keamanan yang terjaga dengan baik; dan (iii) Indonesia harus turut berperan serta secara aktif mendukung terwujudnya perdamaian dunia yang serasi, selaras, dan seimbang dalam pergaulan internasional.

Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan kunci bagi terselenggaranya proses pencapaian cita-cita, tujuan, dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional yang diimplementasikan secara merata ke seluruh penjuru tanah air. Dengan bertitik tolak pada amanat konstitusi dan kemungkinan ancaman yang dihadapi dari waktu ke waktu yang cenderung dinamis sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, maka stabilitas nasional harus menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Perjalanan sejarah bangsa memperlihatkan bahwa Indonesia menghadapi berbagai macam dinamika tantangan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Paradigma baru saat ini adalah

demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pasar bebas yang menjadi norma dan ukuran dalam pergaulan internasional. Hal ini membutuhkan penyesuaian yang cermat dan terukur agar bangsa Indonesia tetap eksis, berdaulat, dan terhormat.

Sementara itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memicu perubahan pola kehidupan modern yang lebih rasional dan individualistik. Akibatnya, spektrum ancaman keamanan menjadi semakin luas, bukan hanya berasal dari dalam atau luar tetapi juga bersifat global, dari ancaman bersifat tradisional menjadi ancaman yang bersifat non tradisional dengan berbagai macam aktor, baik dari aktor negara maupun aktor bukan negara (perorangan atau kelompok).

Kemudian, upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri, dalam arti bahwa mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja. Namun, keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, keamanan nasional menjadi berkembang yang mencakup pertahanan negara, keamanan negara, keamanan ketertiban masyarakat dan keamanan insani.

### ***Balancing, Bandwagoning dan Hedging***

Walt pada 1987 telah memodifikasi Teori Perimbangan Kekuatan Morgenthau (1948) dengan menekankan peran persepsi ancaman dalam menstimulasi perilaku antar negara. Walt berpendapat bahwa negara cenderung mengimbangi ancaman yang ditimbulkan negara lain – bukan dari kekuatan yang dimilikinya.<sup>18</sup> Selanjutnya dia berpendapat bahwa ada empat faktor yang membangun persepsi ancaman, yaitu kekuatan agregat (lawan), kedekatan geografi, kemampuan ofensif dan intensi ofensif. Namun, tidak semua faktor tersebut memiliki bobot yang sama dari ancaman, satu faktor bisa saja lebih dominan dari yang lain.

Namun Teori *Balancing* dan *Bandwagoning* yang ditawarkan oleh Walt

---

<sup>18</sup> Ibid. 7.

ini tidak tepat bagi negara-negara Non Blok, atau negara netral/tidak memihak blok manapun. Sifat Non Blok tidak memungkinkannya untuk melakukan *bandwagoning*. Sedangkan untuk *balancing* yang bersifat eksternal berupa aliansi juga tidak mungkin dilakukan. Namun, membangun kekuatan militer membutuhkan sumber daya finansial yang sangat besar. Bagi negara berkembang yang masih membutuhkan alokasi sumber daya untuk pembangunan sektor ekonomi tentu saja memiliki keterbatasan dalam membangun kekuatan militernya.

Di tengah ketiadaan solusi yang dianggap paling cocok bagi negara Non Blok dalam menghadapi ketidakseimbangan kekuatan, menurut Kuik yang dikutip oleh Monratama dan Yani (2017), menambahkan satu solusi baru berupa *hedging*.<sup>19</sup> Konsep *Hedging* ini didefinisikan sebagai perilaku pengimbangan kekuatan melalui sejumlah opsi kebijakan untuk menghasilkan efek yang diharapkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan penuh resiko.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan terbentuk-

nya aliansi tersebut. Oleh karena itu, negara lemah harus membangun hubungan positif sejak dini dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi negara mitra aliansinya, meskipun mereka saling berkompetisi. Hubungan baik harus dibangun sedemikian rupa agar negara-negara yang memiliki kekuatan lemah, apabila dalam kondisi terdesak, maka proses yang dibutuhkan untuk membangun sebuah aliansi dapat cepat dibentuk, sehingga negara-negara lemah akan terhindar dari petaka akibat serangan negara atau aliansi musuh yang lebih kuat. Namun demikian, jika negara-negara lemah bergabung dalam suatu aliansi pertahanan/militer, maka negara itu pun harus melepaskan statusnya sebagai Negara Non Blok.

### **Konsep Bargaining**

Untuk mempertahankan status negara-negara lemah sebagai negara Non Blok, Monratama dan Yani (2017) menawarkan suatu konsep baru dengan nama *Bargaining*.<sup>20</sup> Konsep ini memanfaatkan instrumen kemitraan strategis dengan kekuatan hegemoni global dan hegemoni regional yang saling bersaing untuk mengambil manfaat dari keduanya dalam

---

<sup>19</sup> Ibid. 7.

<sup>20</sup> Ibid. 7.

bidang pertahanan dan ekonomi. Dalam *bargaining*, negara-negara lemah tidak berharap membangun aliansi di kemudian hari. Orientasi dalam *bargaining* adalah dalam proses dan bukan outputnya. Pemanfaatan struktur keamanan dilakukan dengan membangun hubungan kerjasama dari negara-negara yang berpengaruh bagi keamanannya berdasarkan skala prioritas. Prioritas kerjasama itu dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu (i) kelompok politik dan keamanan; dan (ii) kelompok ekonomi.

Pembagian kelompok prioritas kerjasama ini ditujukan untuk lebih mengoptimalkan nilai manfaat nyata dari mitra kerja sama strategis yang memiliki nilai yang dianggap paling bermanfaat bagi kepentingan nasional negara-negara lemah. Pengelompokan mitra kerja sama ke dalam dua kelompok ini (ekonomi dan keamanan) perlu diupayakan untuk tetap terbagi secara konsisten. Namun demikian, negara-negara lemah harus mampu mengembangkan diplomasinya secara cerdas untuk mengoptimalkan nilai manfaat dari kerjasama di tiap kelompok kerja sama tersebut. Manakala ada negara mitra kerja sama yang kurang mau bekerja sama dengan optimal, maka

negara-negara lemah dapat beralih untuk memacu manfaat yang diinginkan dari kelompok yang lainnya. Namun, hal itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan *bargaining power* terhadap mitra kerja sama di kelompok sebelumnya.

Dalam konsep *bargaining*, maka politik internasional dipersyaratkan terbagi dalam dua kekuatan utama secara bipolar yaitu keduanya saling bersaing. Namun, tujuan utama dari kebijakan luar negeri, *bargaining* yang didasari perspektif neo-realis adalah terciptanya kuasi-aliansi dengan negara mitra strategis di bidang politik dan keamanan. Negara mitra strategis di bidang ekonomi sesungguhnya adalah katalis bagi terselenggaranya hubungan yang efektif di bidang politik dan keamanan. Manakala hubungan dengan mitra keamanan tidak efektif, maka hubungan keamanan dengan mitra ekonomi ditonjolkan, meskipun hal itu semata-mata dilakukan untuk membuat hubungan keamanan dengan mitra keamanan kembali berjalan dengan frekuensi yang cukup sering.

Konsep *bargaining* dengan membagi kedalam dua kelompok besar, ekonomi dan politik-pertahanan ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu: (i) apabila negara kelompok ekonomi

berseteru dengan kelompok politik-keamanan, maka dapat dipastikan sedikit banyak akan mempengaruhi kerja sama negara non blok (lemah) dengan negara-negara tersebut; dan (ii) kelompok politik-keamanan karena memiliki sumber daya pertahanan yang kuat tentu saja akan berusaha menekan negara lemah (non blok) untuk tidak melakukan kerja sama ekonomi dengan negara kelompok ekonomi, karena negara adidaya tersebut ingin menguasai sumber daya yang ada di negara lemah.

Oleh karena itu, konsep *bargaining* Montratama dan Yani ini perlu dimodifikasi sedemikian rupa dengan memperhatikan beberapa kepentingan dari pertahanan dan ekonomi negara-negara adidaya. Sehingga pada satu titik tidak hanya bekerja sama dalam bidang ekonomi, namun harus diimbangi dengan kerja sama bidang politik-keamanan, gunanya adalah untuk menghindari tekanan dari negara adidaya lainnya. Maksudnya disini adalah bahwa konsep *bargaining* harus diletakkan pada kepentingan yang selaras dengan politik bebas aktif negara lemah.

### **Pembangunan Kekuatan Maritim Kawasan**

Untuk mendukung aspirasi geopolitiknya masing-masing, negara-negara di kawasan Asia Pasifik, salah satunya adalah membangun kekuatan militer (Angkatan Laut) sebagai salah satu instrumen kekuatan nasionalnya. Dengan memperhatikan karakteristik kawasan, pembangunan kekuatan Angkatan Laut dalam beberapa dekade terakhir meningkat cukup pesat. Pembangunan kekuatan Angkatan Laut yang dilaksanakan bukan sekedar untuk merespon ancaman asimetris, tetapi mencakup pula ancaman simetris yang tidak dapat diabaikan di kawasan ini seiring makin meningkatnya persaingan antar negara dalam memperebutkan wilayah dan memperluas pengaruhnya pada bidang maritim.

Sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik diketahui telah menambah dan memodernisasi Angkatan Lautnya untuk mengimbangi kekuatan China di kawasan ini. Malaysia memperkuat kekuatan Angkatan Lautnya melalui pengadaan sejumlah alutsista dari negara-negara Eropa, baik kapal permukaan maupun kapal selam. Selain pengadaan kapal perang, Malaysia juga terlihat membangun sejumlah pangkalan baru Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM), seperti di Lumut dan Sabah. Untuk

memperkuat pertahanan maritim di sekitar Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Laut China Selatan, Malaysia mengembangkan pangkalan Angkatan Laut di Teluk Sepanggar, Sabah, yang menjadi pangkalan induk bagi divisi kapal selamnya. Pembangunan sejumlah pangkalan TLDM di wilayah Sabah menandakan adanya perluasan strategi maritim Malaysia, yang semula hanya berfokus pada keamanan Selat Malaka, kini melebar ke Laut Natuna (klaim kepulauan Spratly – LCS), Laut Sulu (perompak dari *Abu Sayyaf Group/ASG*) dan Laut Sulawesi (Blok Ambalat/Migas).

Perluasan strategi maritim hingga di tiga perairan ini dilatarbelakangi oleh isu politik keamanan dan ekonomi. Dari isu politik keamanan, wilayah Serawak dan Sabah merupakan bagian integral dari Malaysia, sehingga salah satu tugas pokok TLDM adalah menjamin tetap terbukanya SLOC Malaysia, yang dalam konteks ini adalah Laut Natuna. Perairan Laut Sulu dan Laut Sulawesi merupakan kawasan rawan aktivitas terorisme maritim yang berpusat di Pulau Mindanao, Filipina yang berimplikasi negatif terhadap keamanan Malaysia di wilayah Sabah dan sekitarnya. Sedangkan isu ekonomi tak lepas dari banyaknya potensi kandungan minyak dan gas bumi

di Laut Sulawesi. Potensi hidrokarbon itulah yang menjadi salah satu faktor pendorong Malaysia mengklaim perairan teritorial dan ZEE Indonesia di Laut Sulawesi pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Adapun di Laut China Selatan, Malaysia bersikap teguh atas klaimnya, ditunjang pula oleh kebijakan pembangunan kekuatan laut Malaysia, seperti pengadaan kapal perang yang berkemampuan *ocean going* dan pembelian lima kapal selam kelas *Scorpene* dari Prancis.

Selanjutnya adalah Singapura, terkait dengan strategi pertahanan laut, Angkatan Laut Singapura dibangun untuk memiliki keunggulan kualitas dibandingkan Angkatan Laut negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Meskipun wilayah perairan mereka sangat kecil, tetapi jumlah kapal perang yang dimiliki jauh melebihi ukuran kebutuhan untuk mempertahankan negara itu. Kekuatan kombatan Angkatan Laut Singapura berpusat pada enam fregat kelas *Formidable*, dua kapal selam kelas *Vastergotland* dan empat kapal selam kelas *Sjoormen*. Kekuatan tersebut dirancang untuk mampu mengamankan SLOC Singapura yang bukan saja di Selat Malaka, tetapi mencakup pula Laut China Selatan (LCS), Teluk Persia dan Laut

Merah. Dengan kualitas Angkatan Laut yang demikian, Singapura aktif dalam koalisi internasional untuk mengamankan perairan di Somalia dan sekitarnya dari ancaman bajak laut. Angkatan Laut Singapura telah terlibat dalam *Combined Task Force-150* (CTF-150) dan CTF-151 di bawah komando NATO. Partisipasi aktif tersebut merupakan implementasi kebijakan nasional Singapura yang memberikan perhatian secara khusus pada keamanan SLOC-nya.

Thailand dinilai tidak memiliki kepentingan yang signifikan pada bidang maritim di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, oleh karena itu pembangunan kekuatan Angkatan Lautnya tidak terlalu menonjol. Eksistensi kapal induknya tidak dieksplorasi secara optimal yang dapat dilihat dari tidak adanya penyebaran kapal tersebut ke luar wilayah yurisdiksinya. Namun dalam perkembangan terakhir, Thailand menunjukkan minatnya untuk membeli dua eks kapal selam U-206 eks Angkatan Laut Jerman. Meskipun demikian, Thailand setidaknya hingga satu dekade ke depan tidak akan membangun kekuatan laut secara progresif dibandingkan beberapa negara lain di kawasan.

Sedangkan Vietnam yang berselisih dengan China di LCS, kini tengah memperkuat Angkatan Lautnya. Fokus pembangunan kekuatannya melalui pengadaan enam kapal selam kelas Kilo dari Rusia. Pengadaan kapal selam tersebut secara terbuka diakui oleh Vietnam untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di LCS, di mana Vietnam adalah salah satu negara pengklaim LCS. Langkah Vietnam dalam memodernisasi kekuatan Angkatan Lautnya merupakan suatu terobosan baru, karena selama ini negara tersebut sangat dikenal dengan modernisasi kekuatan daratnya.

Filipina merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik dengan kekuatan Angkatan Lautnya yang lemah dalam negara-negara pengklaim LCS. Upaya modernisasi kekuatan Angkatan Laut senantiasa mengalami hambatan karena keterbatasan anggaran. Konflik internal di Mindanao membuat sebagian besar anggaran pertahanan Filipina diarahkan pada upaya untuk mengatasi pemberontakan dan terorisme di wilayah selatan negara itu. Dalam perkembangan terakhir, Angkatan Laut Filipina membeli eks *USCG Hammilton* dari *US Coast Guard* yang akan menjadi *capital ship* menggantikan BRP Rajah Humabon yang

merupakan kapal *destroyer escort* eks Perang Dunia Kedua. Selain itu, Filipina juga telah membeli dua unit kapal pendukung *SSV* 123 meter yang merupakan famili dari Kapal *Landing Platform Dock* (LPD) rancang-bangun PT. PAL Indonesia.

Demikian juga Amerika Serikat terus memperkuat dan mempertahankan kehadirannya di kawasan Asia Pasifik, terlebih lagi ketika China muncul sebagai kekuatan baru. Kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan ini selain untuk mengamankan kepentingan nasionalnya, khususnya kebebasan bernavigasi (*freedom of navigation*), juga untuk mempertahankan hegemoninya sebagai negara adidaya. Untuk mendukung kehadiran tersebut, Amerika Serikat memiliki beberapa pangkalan di sekitar Laut China Selatan seperti di Sasebo, Okinawa, Changi Singapura dan Guam. Sejak masa pemerintahan Presiden George W. Bush, Amerika Serikat secara bertahap telah memindahkan (*rebalancing*) sebagian kekuatan militernya dari kawasan Eropa ke kawasan Asia Pasifik untuk merespon

dinamika lingkungan strategis yang semakin berkembang di kawasan ini.

Tidak mau kalah, China kemudian mengembangkan strategi pertahanannya yang dikenal dengan nama “*Offshore Defense*” dan strategi pembagian zona pertahanan yang disebut sebagai “*two island chains*” yang terdiri dari *the first island chain* dan *second island chain*. Strategi ini menerapkan konsep pembangunan rangkaian pulau pertama dari kepulauan besar yang membentang dari pantai daratan benua Asia Timur dan termasuk kepulauan yang membentang di Laut China Selatan.

Diketahui bahwa China telah menyuap negara-negara pulau kecil di rangkaian pulau kedua strategis yang membentang dari Jepang hingga Kepulauan Mariana dan Mikronesia di Samudra Pasifik. Diperkirakan dalam dekade mendatang China diproyeksikan akan memiliki armada angkatan laut dan kapal selam terbesar di dunia. Hampir dua pertiga dari 50 pelabuhan utama di dunia dimiliki oleh China atau telah menerima sejumlah investasi China.<sup>21</sup>

Diperkirakan China terus melakukan pembelian pangkalan secara besar-

---

<sup>21</sup>Mohan Malik, “Melawan Ambisi Maritim Tiongkok”, dalam <https://ipdefenseforum.com/id/2020/03/mela>

wan-ambisi-maritim-tiongkok, Maret 2020, diakses tanggal 11 November 2020.

besaran guna memperkuat kemampuan lepas pantainya untuk tujuan komersial dan strategis, menempatkan penjaga keamanan swasta, pasukan nontempur, dan menyediakan persenjataan ke negara-negara yang lokasinya strategis di sepanjang jalur laut dan titik keluar masuk rawan maritim.

*Offshore Defense* merupakan konsep strategis yang mengarahkan PLA Navy untuk bersiap memenuhi tiga misi kunci “untuk periode baru” melalui pelibatan dalam operasi-operasi maritim di laut dan membangun Angkatan Laut yang mampu melaksanakan operasi berkelanjutan di laut. Tiga misi kunci yang diemban oleh Angkatan Laut China yaitu: (i) menjaga musuh dalam batas dan menolak invasi dari laut; (ii) melindungi kedaulatan teritorial nasional; dan (iii) menjaga keutuhan negaranya dan hak-hak maritim yang di klaim di LCS dan LCT.

China pada awalnya juga dikenal sebagai negara yang lebih mengedepankan kekuatan darat dibandingkan kekuatan laut dan udara, tetapi memasuki milenium ketiga, China mengubah strategi pembangunan kekuatan dengan memodernisasi dan memenuhi alutsista kekuatan laut dan udaranya. China sangat paham sekali jika ingin menguasai 90% Laut China Selatan

dan Laut China Timur, maka harus memiliki penguasaan atau keunggulan udara dan lautnya.

Kemudian untuk melaksanakan strategi tersebut, saat ini China sangat aktif membangun kekuatan Angkatan Lautnya menuju status *blue water navy*, sebuah kekuatan angkatan laut yang dapat diproyeksikan ke kawasan mana pun di dunia ini. Selain memperkuat armada kapal atas air dan kapal selam, China juga tengah menyelesaikan kapal induk produksi dalam negeri pertamanya, setelah membangun kembali kapal induk Varyag eks Rusia yang dibelinya. Eksistensi kapal induk dalam jajaran armada Angkatan Laut China saat ini dinilai telah mengubah konstelasi perimbangan kekuatan kawasan dengan aktif berlayar di LCS dan beberapa kali telah melakukan latihan peperangan.

Kepentingan Jepang di kawasan Asia Pasifik tidak lepas dari keamanan SLOC-nya yang akan berimbas langsung apabila terjadi konflik di perairan LCS dan LTS. Sebabnya adalah 70 persen kapal tanker milik Jepang yang membawa minyak menuju ke Jepang diketahui melalui Selat Malaka dan Laut China Selatan, meskipun sebenarnya kapal tersebut dapat menghindari melalui perairan Indonesia menuju Samudera

Pasifik. Jalur terakhir ini akan memakan waktu dan biaya yang besar sehingga dipandang tidak ekonomis. Dari sini tergambar jelas bahwa keamanan SLOC Jepang sangat berkaitan erat dengan keamanan energinya. Keamanan energi kini menjadi isu strategis bagi banyak di dunia seiring ketergantungan pada sumber energi di Timur Tengah yang rawan dan dinamika lingkungan strategis yang ditandai dengan menonjolnya ancaman asimetris seperti terorisme, pembajakan dan perompakan di laut. Gangguan terhadap keamanan energi merupakan suatu ancaman langsung terhadap keamanan nasional Jepang.

Isu keamanan SLOC sangat mempengaruhi pula karakteristik dari *Japan Maritime Self-Defense Force* (JMSDF/Angkatan Laut) sejak awal berdiri pada tahun 1952 hingga saat ini. Sejak kelahirannya, Armada JMSDF dirancang sedemikian rupa untuk melindungi jalur perhubungan laut Jepang, sehingga kemudian lahir doktrin operasi 1.000 mil laut sebagai konsekuensinya. Kemudian hal yang sangat menarik dan menjadi perhatian adalah dalam pembangunan kekuatan JMSDF terkini adalah kehadiran

dua kapal induk helikopter kelas Izumo. Kehadiran kapal induk helikopter ini akan memberikan warna baru terhadap dukungan signifikan pada penyebaran kekuatan JMSDF yang selama ini sudah dilakukan di kawasan Asia Pasifik.

Salah satu hal yang menarik dari Pedoman Program Pertahanan Nasional (*National Defense Program Guidelines*) Jepang adalah terakit pengumuman dua kapal induk helikopter kelas Izumo (digolongkan di Jepang sebagai kapal perusak) akan diubah untuk meluncurkan dan memulihkan pesawat tempur F-35B. Hingga 40 varian *short-take off* dan *vertical landing* dari pesawat diharapkan akan dibeli, selain varian F-35A konvensional yang sudah dibeli oleh JASDF. Pesawat tempur siluman F-35B ini akan dioperasikan oleh pilot JASDF, yang berarti bahwa Angkatan Laut dan Pertahanan Udara harus belajar bekerja sama untuk memberikan kemampuan kapal induk.<sup>22</sup>

Selanjutnya adalah Angkatan Laut India, menurut *Blue Print Indian Navy* pada tahun 2022 akan diperkuat dengan 160 kapal perang, termasuk didalamnya tiga kapal induk, 54 kapal kombatan atas air,

---

<sup>22</sup>Tim Fish, "Japan Maritime Self-Defense Force Expanding as Tokyo Takes New Approach to Maritime Security", dalam <https://news.usni.org/2019/05/29/japan->

[maritime-self-defense-force-expanding-as-tokyo-takes-new-approach-to-maritime-security](https://news.usni.org/2019/05/29/japan-maritime-self-defense-force-expanding-as-tokyo-takes-new-approach-to-maritime-security), 29 Mei 2019, diakses tanggal 24 November 2020.

34 kapal selam berbagai tipe dan hampir 400 pesawat udara berbagai tipe.<sup>23</sup> Pembangunan kekuatan laut India, sebagaimana dinyatakan dalam *The Indian Navy's Vision Document* ditujukan untuk mempromosikan lingkungan yang tenang dan damai di kawasan Samudera Hindia untuk mencapai tujuan-tujuan politik, ekonomi, diplomasi dan militer India. Dalam *The Indian Maritime Doctrine*, hal yang digarisbawahi adalah kebutuhan untuk mengendalikan *choke points*, pulau-pulau penting dan jalur-jalur perdagangan vital. Terkait dengan kebutuhan tersebut, Angkatan Laut India menekankan diplomasi Angkatan Laut sebagai salah satu tugas utamanya di masa damai. Adapun wilayah penyebaran kekuatan laut India dalam rangka diplomasi Angkatan Laut terbentang dari Teluk Persia hingga Selat Malaka yang ditetapkan sebagai kawasan kepentingan India yang sah.

Australia, Strategi militer yang diterapkan oleh Australia adalah *to deter and defeat attacks on Australia*. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk *pre-emptive strategy* dengan cara menyerang musuh sejauh mungkin dari wilayahnya melalui

operasi gabungan di jalur-jalur pendekat menuju Australia. Terkait dengan hal tersebut, strategi maritim menjadi fokus utama dalam pertahanan Australia yang mengedepankan keterpaduan antar ketiga matra dalam *Australian Defence Force*. Selain *Royal Australian Air Force*, *Australian Army* juga mendapat peran dalam strategi maritim negeri itu. Peran *Australian Army* adalah mengendalikan jalur-jalur pendekatan, mengamankan wilayah-wilayah di seberang Samudera dan beragam fasilitas, mengalahkan serangan mendadak ke wilayah Australia, melindungi pangkalan-pangkalan yang menjadi basis operasi *Royal Australian Navy* dan *Royal Australian Air Force* dan menolak akses lawan ke pangkalan aju.

Pembangunan kekuatan laut difokuskan pada kemampuan peperangan bawah air, dengan tambahan kemampuan peperangan udara dan peperangan amfibi. Untuk kemampuan peperangan bawah air, hingga tahun 2030 *Royal Australian Navy* akan memiliki 12 kapal selam pengganti kapal selam konvensional kelas Collins yang dilengkapi dengan rudal permukaan, delapan fregat anti kapal selam untuk

---

<sup>23</sup>Globalsecurity.org, "India - Navy Modernization", dalam <https://www.globalsecurity.org/military/world>

[/india/in-navy-development.htm](#), t.t., diakses tanggal 23 November 2020.

menggantikan fregat kelas Anzac dengan dimensi yang lebih besar dan 24 helikopter anti kapal selam. Adapun kemampuan peperangan udara masih terkait dengan program SEA 4000/*Air Warfare Destroyer* (AWD) kelas Hobart yang akan dilengkapi dengan rudal anti pesawat jarak jauh Standard Missile 6 (SM-6), selain *Aegis Combat System*. Sistem sensor *Cooperative Engagement Capability* (CEC) akan terpasang pula di kapal itu, sehingga nantinya interoperabilitas dengan sensor serupa pada pesawat udara AEW & C milik *Royal Australian Air Force*. Sedangkan untuk kemampuan peperangan amfibi, programnya adalah pengadaan dua *Landing Helicopter Dock* (LHD) bertonase 27.000 ton dari galangan Navantia, Spanyol, di samping sejumlah kapal baru yang belum ditentukan jumlahnya, dengan tonase 10.000-15.000 ton, mempunyai landasan helikopter dan mampu menurunkan kendaraan dan kargo lainnya tanpa membutuhkan dukungan infrastruktur pelabuhan.

Untuk memodernisasi Angkatan Bersenjata Australia, PM Morrison dalam pidatonya di depan Akademi Militer

Australia mengumumkan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran \$270 miliar (sekitar Rp2.700 triliun) bagi peningkatan kemampuan pertahanan selama satu dekade. Alokasi belanja ini termasuk senjata penyerang yang lebih kuat, kemampuan siber dan sistem pengawasan bawah air berteknologi tinggi.<sup>24</sup>

### **Implikasi Terhadap Pembangunan Kekuatan Laut Indonesia**

Dinamika geopolitik kawasan Asia Pasifik yang sekarang lebih dikenal dengan Indo Pasifik dan sekitarnya sangat mempengaruhi Indonesia. Dalam konteks tersebut, terjadi pertemuan antara kepentingan geopolitik yang tengah berkembang di kawasan dengan kepentingan geopolitik Indonesia. Kepentingan geopolitik Indonesia yang utama adalah keutuhan dan kesatuan Indonesia dari semua aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Hal ini telah diamanatkan oleh Wawasan Nusantara yang menjadi pandangan geopolitik Bangsa Indonesia.

Pertemuan kepentingan geopolitik tersebut bisa saja melahirkan kerja sama,

---

<sup>24</sup>Tempo.co, “‘Dunia Akan Lebih Kacau’: Australia Belanja Senjata Hingga Rp2.700 Triliun”, dalam <https://www.tempo.co/abc/5737/dunia-akan->

[lebih-kacau-australia-belanja-senjata-hingga-rp2-700-triliun](https://www.tempo.co/abc/5737/dunia-akan-lebih-kacau-australia-belanja-senjata-hingga-rp2-700-triliun), 2 Juli 2020, diakses tanggal 23 November 2020.

namun juga dapat memunculkan konflik atau perseteruan. Mengacu pada pemikiran geopolitik, terhadap interaksi antara ruang dengan manusia. Interaksi tersebut melahirkan kesadaran ruang yang secara langsung maupun tidak langsung terkait erat dengan kepentingan keamanan nasional dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam konteks negara modern, konsep kesadaran ruang diwujudkan melalui adanya klaim kedaulatan, yang dibatasi oleh batas negara (*boundary*) dengan seperangkat hukum dan aparat untuk menjamin keamanan dan kedaulatan.

Terkait dengan dinamika perkembangan geopolitik kawasan, terdapat beberapa dampak yang perlu diantisipasi oleh Indonesia sejak dini. Pertama, adalah dampak di bidang politik. Dinamika geopolitik kawasan dari perspektif maritim akan berdampak negatif terhadap Indonesia maupun stabilitas kawasan apabila tidak dikelola dengan baik. Dewasa ini, isu-isu yang kerap mengemuka di kawasan Asia Pasifik adalah keamanan maritim, keamanan energi dan sengketa wilayah. Disini, Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ketiga isu tersebut. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola isu-isu

pembangunan kekuatan Angkatan Laut agar tidak memperbesar kesenjangan perimbangan kekuatan, sejatinya dalam kesenjangan itu memicu pihak yang merasa diri lebih kuat akan melakukan tindakan-tindakan yang dipandang dapat mengancam stabilitas kawasan. Apabila Indonesia tidak memiliki daya tawar yang tinggi dari aspek kekuatan militer khususnya Angkatan Laut, muncul peluang akan terulangnya kembali tindakan-tindakan pelecehan dan tidak menghormati kedaulatan maritim Indonesia, khususnya pada perairan yang masih menjadi sengketa dengan negara tetangga maupun pada perairan strategis seperti *choke points* dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Kedua, dampak dalam bidang ekonomi dari dinamika geopolitik kawasan dari perspektif maritim terhadap Indonesia dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positif yaitu semakin terbuka peluang kerja sama antar Kekuatan Laut kawasan dalam merespon ancaman dan tantangan yang terkait dengan keamanan maritim dan keamanan energi, khususnya ancaman asimetris seperti pembajakan, perompakan dan terorisme maritim. Untuk merespon ancaman demikian, salah satu kata kuncinya adalah kerja

sama antar negara selain adanya sikap politik yang sebangun melalui patrol bersama atau patrol terkoordinasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah kemungkinan penggunaan kekuatan laut untuk mengamankan sumberdaya laut di perairan sengketa, baik perikanan maupun minyak dan gas bumi. Hal demikian dapat dilihat dalam sengketa Laut China Selatan dan Laut Sulawesi, di mana kekuatan laut digunakan oleh negara-negara lain untuk merebut sumber daya alam yang diklaim oleh Indonesia sebagai wilayah ZEE-nya.

Ketiga, dampak pada bidang militer. Pembangunan kekuatan laut di kawasan dalam rangka mengamankan kepentingan nasional masing-masing negara akan merugikan Indonesia apabila tidak direspon secara proporsional oleh pemerintah. Pembangunan kekuatan laut (TNI Angkatan Laut/*Indonesia Navy* dan Bakamla/*Indonesia Costguard*) harus tetap dijalankan sesuai dengan program *Minimum Essential Force* (MEF) agar jarak yang tidak seimbang kekuatan antara Indonesia dan negara-negara lain di kawasan ini tidak semakin melebar. Apabila melebar, ini dapat memberikan kontribusi negatif bagi kepentingan Indonesia di kawasan, meskipun diyakini tidak akan ada invasi terhadap Indonesia

hingga dekade mendatang. Namun yang menjadi pertanyaan dan pemikiran bersama adalah perebutan wilayah perbatasan yang mengandung sumber daya energi, siapa yang berani menjamin tidak akan ada perang atau konflik bersenjata meskipun dalam skala kecil/lokal. Meskipun berskala kecil dan bersifat lokal, seperti yang terjadi antara India dengan China di wilayah dataran tinggi Ladakh Himalaya, antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh, dampaknya adalah kedaulatan negara terancam.

Pembangunan kekuatan laut Indonesia bukan sekedar untuk menjaga dan mengamankan keutuhan wilayah perairan Indonesia, namun mencakup pula pengamanan kepentingan ekonomi Indonesia baik di wilayah yurisdiksi maupun di luar wilayah yurisdiksi. Semestinya pemikiran tersebut menaungi orang-orang cerdas pandai yang duduk membuat kebijakan, sehingga Indonesia tidak dipermainkan dan dipandang sebelah mata oleh negara lain saat kekuatan bersenjata kita mundur dan lemah.

Dengan semakin meningkatnya interaksi ekonomi Indonesia dengan negara-negara Asia Timur maupun kawasan lain di dunia, TNI Angkatan Laut

dan Badan Keamanan Laut Indonesia dituntut untuk mampu mengamankan SLOC Indonesia. Sudah sewajarnya, kasus pembajakan MV Sinar Kudus pada 16 Maret 2011 oleh bajak laut Somalia dapat memberikan pelajaran berharga kepada Indonesia betapa SLOC yang harus dilindungi bukan hanya berada di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia, namun juga di luar wilayah yurisdiksi. Mungkin Indonesia perlu mewacanakan kekuatan laut yang *blue water navy* atau setidaknya mampu *ocean going*, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin dengan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Namun demikian, dalam percaturan politik internasional, Indonesia perlu secara hati-hati mendasarkan kepentingan negara-negara Adidaya, sehingga Indonesia tidak terjebak dalam perlombaan senjata yang pada akhirnya hanya akan memberikan dampak negatif semata bagi Indonesia. Dalam diplomasi internasional, Indonesia perlu mengedepankan pendekatan yang seimbang antara dunia barat yang di wakili oleh Amerika Serikat dan Sekutunya, juga melakukan pendekatan yang sama dengan China dan Rusia pada satu pihak. Menjalinkan kemitraan di sektor

keamanan dan sektor ekonomi dengan Amerika Serikat, Rusia dan China,<sup>25</sup> sebagai konsep *bargaining* dari Montratama dan Yani (2017) yang telah dimodifikasi. Konsep *bargaining* ini, sama sekali berbeda dengan konsep *hedging* yang dikemukakan oleh Kuik tahun 2010, yang tidak secara jelas menetapkan siapa mitra penjuror di sektor ekonomi dan politiknya dan yang pada situasi kritis akan mengarah pada pembentukan aliansi. Dalam konsep *bargaining*, tidak ada orientasi menjadi negara aliansi sama sekali. Namun, tujuan utama di sektor politik dan keamanan yang hendak dibangun adalah kuasi-aliansi, yaitu suatu bentuk aliansi tidak resmi yang tetap memberi suatu ekspektasi bagi negara mitra untuk mendapatkan bantuan militer jika terlibat konflik dengan negara lain.

### **Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan**

Geopolitik kawasan Asia Pasifik akan selalu dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pada bidang maritim, sebab kawasan ini memiliki perairan yang sangat penting dan menjadi sumber sengketa beberapa negara. Perkembangan

---

<sup>25</sup>Faisal Rahman, "Implementasi Doktrin Tridarma Ekakarma Melalui Teori Perimbangan

Kekuatan," *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 4, No. 1, 2018.

lingkungan strategis menunjukkan bahwa dinamika geopolitik kawasan diwarnai oleh isu-isu simetris dan asimetris sekaligus.

Persaingan antar negara dalam perebutan wilayah maupun pengaruh pada bidang maritim seiring sejalan dengan integrasi ekonomi kawasan melalui berbagai moda kerja sama. Pembangunan kekuatan Angkatan Laut terus berlangsung di kawasan ini meskipun belum dapat dikatakan sebagai suatu perlombaan senjata (*arm race*).

Melihat kondisi yang demikian, sangat jelas Indonesia akan terkena dampaknya seiring posisi strategis yang dimiliki oleh Indonesia dalam percaturan politik, ekonomi dan keamanan kawasan. Dampak yang terjadi bisa positif dan negatif, untuk merespon dampak tersebut, sudah sewajarnya Indonesia memiliki kekuatan laut yang mampu mengamankan kepentingan nasional di bidang maritim.

Dengan memiliki kekuatan laut yang berkualitas dan modern, maka dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat dinamika geopolitik terhadap stabilitas kawasan sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam percaturan kawasan, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi

perekonomian Indonesia melalui kemampuan kekuatan lautnya dalam mengamankan sumber daya laut dan SLOC Indonesia, baik di dalam yurisdiksi maupun di luar yurisdiksi.

Kemitraan strategis Indonesia dengan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia dan China dapat dijadikan sebagai instrumen perimbangan kekuatan eksternal atas ancaman negara-negara kawasan dan aliansinya, sekaligus menjadi media penghubung dalam penyelesaian konflik antar negara secara damai. Hal itu disebabkan kemitraan yang strategis, fleksibel dan tidak mengikat, namun tetap memberi koridor kerja sama yang bersifat khusus antar sesama negara mitra strategis. Kekhususan kerja sama ini yang harus dioptimalkan oleh negara mitra strategis untuk mengamankan kepentingannya, terutama dalam upaya perimbangan kekuatan dengan aliansi kuat lawan.

Strategi pembangunan kekuatan dengan menggunakan kemitraan strategis ini, merupakan penyempurnaan Teori Perimbangan Kekuatan yang hanya menawarkan strategi *balancing* dan *bandwagoning*. Konsep *Bargaining* sebagai bagian dari *strategi balancing* akan memberikan nilai strategis jika

ditujukan pada negara Non Blok yang lemah dalam menghadapi ancaman aliansi lawan yang lebih kuat, tetapi tidak menggunakan aliansi atau blok militer sebagai instrumen diplomasinya. Namun demikian, yang perlu menjadi perhatian adalah efektivitas *bargaining* ini akan ditentukan oleh sejauh mana kerja sama di bidang politik dan keamanan dengan negara mitranya dapat terbangun dengan baik.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Alami, Athiqah Nur. (2016). “Kebijakan Pertahanan Australia Dan Respons Negara-Negara Asia Timur Dan Selandia Baru”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 3, hlm. 101–109.
- Bappenas. (2014). “Konsep ‘Mainstreaming Ocean Policy’ kedalam Rencana Pembangunan Nasional”, Bappenas, hlm. 360.
- Hendrajit. (2017). “Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia Pasifik”, *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, Vol. 29, hlm. 31–41.
- Indian Navy. (2015). “Indian Naval Indigenisation Plan (INIP) 2015-2030”, *Directorate of Indigenisation*, hlm. 1–99.
- Klein, N. (2006). “Legal implications of Australia’S Maritime Identification System”, *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 55, No.2, hlm. 337–368.
- Montratama, I., & Yani, Y. M. (2017). “Bargaining: Revisi Teori Perimbangan Kekuatan dalam Hubungan Diplomas Indonesia, Malaysia, Cina dan Amerika Serikat”, *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 2, No. 1, hlm. 53.
- Rahman, F. (2018). “Implementasi Doktrin Tridarma Ekakarma Melalui Teori Perimbangan Kekuatan”, *Jurnal Sosial Politik*, 4 No.1, 78.
- Supandi, A. (2015). “Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, *Jurnal Pertahanan*, Vol.5, No.2, 5, 1–24.

### Buku

- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The Evolution Of International Security Studies* (Ed. 1). Cambridge University Press.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); Cet. 1). Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet. Ke-19). Penerbit Alfabeta.

### Website

- BBC Indonesia. "Konflik Armenia-Azerbaijan: Kedua kubu sepakati gencatan senjata yang diperantarai AS", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/du-nia-54655091>, 23 Oktober 2020, diakses tanggal 14 November 2020.
- Detik.com. “RI Akan Gelar Kekuatan Laut Jika Australia Terapkan AMIZ”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-257770/ri-akan-gelar-kekuatan-laut-jika-australia-terapkan-amiz>, 17 Desember 2004, diakses tanggal 23 November 2020

Fish, T. "Japan Maritime Self-Defense Force Expanding as Tokyo Takes New Approach to Maritime Security", dalam <https://news.usni.org/2019/05/29/japan-maritime-self-defense-force-expanding-as-tokyo-takes-new-approach-to-maritime-security>, 29 Mei 2019, diakses tanggal 24 November 2020.

Globalsecurity.org. "India - Navy Modernization", dalam <https://www.globalsecurity.org/military/world/india/in-navy-development.htm>, t.t., diakses tanggal 23 November 2020

Hendrajit, & Pranoto, M. Arief. "Takdir Geopolitik Indonesia di Tengah Pertarungan Global AS-Cina di Asia Pasifik," dalam <https://theglobal-review.com/takdir-geopolitik-indonesia-di-tengah-pertarungan-global-as-cina-di-asia-pasifik>, 16 Juni 2016, diakses tanggal 14 November 2020.

Malik, Mohan. "Melawan Ambisi Maritim Tiongkok", dalam <https://ipdefenseforum.com/id/2020/03/melawan-ambisi-maritim-tiongkok>, 2020, diakses tanggal 11 November 2020.

Tempo.co. "Dunia Akan Lebih Kacau: Australia Belanja Senjata Hingga Rp2.700 Triliun", dalam <https://www.tempo.co/abc/5737/dunia-akan-lebih-kacau-australia-belanja-senjata-hingga-rp2-700-triliun>, 2 Juli 2020, diakses tanggal 23 November 2020.

Yudhoyono, S. B. "Geopolitik - Geopolitik Kawasan Asia Tenggara: Perspektif Maritim." dalam [https://theglobal-review.com/lama/content\\_detail.php?lang=id&id=17778&type=111](https://theglobal-review.com/lama/content_detail.php?lang=id&id=17778&type=111), 2015, diakses tanggal 14 November 2020.